

Madani: Jurnal Ilmiah Multidisiplin
Volume 3, Nomor 5, June 2025, P. 757-764
E-ISSN: 2986-6340
Licensed by CC BY-SA 4.0
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15753998>

Strategi Komunikasi Politik Dalam Membangun Opini Publik: Antara Narasi dan Realita

Amran Pikal Siregar, Hasan Sazali, Retno Sayekti

1 2 3 Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

E-mail: amran3005243005@uinsu.ac.id, hasansazali@uinsu.ac.id, retnosayekti69@uinsu.ac.id

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi komunikasi politik dalam membentuk opini publik, khususnya bagaimana narasi yang dibangun oleh aktor politik merefleksikan atau menyimpang dari realitas sosial di era digital. Latar belakang masalah mencakup pergeseran signifikan komunikasi politik dari satu arah menjadi proses dinamis yang partisipatif melalui berbagai platform digital, di mana narasi tidak lagi terbatas pada pidato resmi, melainkan berkembang dalam bentuk konten visual, simbolik, dan interaktif di media sosial. Meskipun strategi ini efektif dalam membangun identitas, keterikatan emosional, dan memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu publik, permasalahan muncul ketika narasi yang dibentuk tidak sesuai dengan realita yang dihadapi publik, yang dapat menimbulkan disonansi kognitif dan menurunkan kepercayaan masyarakat. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif deskriptif, memungkinkan eksplorasi makna, konteks, dan pesan komunikasi politik secara komprehensif. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi (unggahan media sosial, berita online, konten kampanye, pidato politik) dan wawancara mendalam dengan praktisi komunikasi politik, tim kampanye, atau pengamat media. Data dianalisis menggunakan analisis isi kualitatif untuk mengidentifikasi tema, simbol, gaya bahasa, dan pesan utama, dengan triangulasi sumber untuk menjaga validitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktor politik secara strategis memanfaatkan narasi emosional dan berbasis identitas, seperti keadilan, nasionalisme, dan agama, serta framing isu untuk membentuk opini publik. Penggunaan algoritma media sosial mempercepat penyebaran pesan dan menciptakan echo chamber, memperkuat polarisasi. Meskipun efektif dalam membangun kedekatan psikologis dan loyalitas pemilih, ketidaksesuaian antara narasi dan realitas berpotensi menurunkan kepercayaan publik, memicu disonansi kognitif, krisis representasi, serta polarisasi. Oleh karena itu, komunikasi politik yang sehat harus menyeimbangkan narasi dengan validitas realitas untuk memperkuat kredibilitas dan mendorong komunikasi yang demokratis, inklusif, serta edukatif.

Keywords: *Komunikasi Politik, Narasi Politik, Opini Publik, Realitas Sosial, Disonansi Kognitif*

Abstrak

This study aims to analyze political communication strategies in shaping public opinion, specifically how narratives constructed by political actors reflect or deviate from social reality in the digital era. The background of the problem includes a significant shift in political communication from one-way to a dynamic and participatory process through various digital platforms, where narratives are no longer limited to official speeches but evolve into visual, symbolic, and interactive content on social media. While this strategy is effective in building identity, emotional attachment, and influencing public perception of issues, problems arise when constructed narratives do not align with the reality faced by the public, which can lead to cognitive dissonance and a decline in public trust. The research employs a descriptive qualitative method, allowing for a comprehensive exploration of the meaning, context, and messages of political communication. Data collection involves document studies (social media posts, online news, campaign content, political speeches) and in-depth interviews with political communication practitioners, campaign teams, or media observers. Data are analyzed using qualitative content analysis to identify themes, symbols, language styles, and main messages, with source triangulation to ensure validity. The findings indicate that political actors strategically utilize emotional and identity-based narratives, such as justice, nationalism, and religion, as well as issue framing, to shape public opinion. The use of social media algorithms accelerates message dissemination and creates echo chambers, reinforcing polarization. Although effective in building psychological closeness and voter loyalty, the discrepancy between narrative and reality can potentially decrease public trust, trigger cognitive dissonance, a crisis of representation, and polarization. Therefore, healthy political communication must balance narrative with factual validity to strengthen credibility and foster democratic, inclusive, and educational communication.

Kata kunci: *Political Communication, Political Narrative, Public Opinion, Social Reality, Cognitive Dissonance*

Article Info

Received date: 10 June 2025

Revised date: 17 June 2025

Accepted date: 24 June 2025

PENDAHULUAN

Dalam era digital saat ini, strategi komunikasi politik tidak hanya bergantung pada kekuatan narasi, tetapi juga harus mampu mencerminkan realita yang hidup dalam masyarakat. Pemanfaatan media digital, terutama media sosial, telah menjadi alat utama bagi aktor politik untuk menyampaikan

pesan, membentuk persepsi publik, dan memengaruhi perilaku politik masyarakat (Zalzillah & Gumelar, 2024)

Selain itu, Dinamika Strategi Bahasa dalam komunikasi politik di Indonesia memperlihatkan bahwa politisi menggunakan teknik framing, tindak tutur, dan implikatur untuk membangkitkan hubungan emosional, memengaruhi persepsi, dan membangun narasi dukungan terhadap kebijakan atau kandidat tertentu. (Kurniawan et al., 2021). Di media sosial, kemampuan menjangkau audiens secara real-time dan interaktif menambah dimensi baru sehingga strategi komunikasi politik menjadi semakin kompleks dan dinamis

Dalam era digital saat ini, komunikasi politik telah mengalami pergeseran signifikan dari sekadar komunikasi satu arah menjadi proses dinamis yang melibatkan partisipasi aktif publik melalui berbagai platform digital. Narasi politik tidak lagi terbatas pada pidato resmi atau tayangan televisi, melainkan berkembang dalam bentuk konten visual, simbolik, dan interaktif di media sosial (Dwi Frasetya, 2025)

Pentingnya strategi komunikasi berbasis narasi terlihat dari bagaimana politisi merancang pesan yang mampu membangun identitas, menciptakan keterikatan emosional, dan memengaruhi cara pandang masyarakat terhadap isu publik. Narasi politik yang kuat sering kali menjadi kunci dalam membentuk opini publik yang menguntungkan pihak tertentu (Diaz Ruiz & Nilsson, 2023)

Namun, permasalahan muncul ketika narasi yang dibentuk tidak sesuai dengan realita yang dihadapi publik. Ketimpangan ini menimbulkan disonansi kognitif dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap aktor politik maupun media. Narasi yang manipulatif, meskipun secara teknis efektif, justru dapat memperburuk krisis kepercayaan politik.

Media sosial, sebagai ruang utama komunikasi politik hari ini, memperkuat kecenderungan pengguna hanya berinteraksi dalam lingkaran yang sepemikiran, membentuk apa yang dikenal sebagai ruang gema (echo chamber). Hal ini menyebabkan penyebaran narasi yang bersifat sepihak dan memperkuat polarisasi sosial. (Sosial, 2024)

Di tengah kondisi tersebut, strategi komunikasi politik yang sehat dan bertanggung jawab harus menyeimbangkan antara daya tarik narasi dan validitas realita. Pendekatan ini tidak hanya memperkuat kredibilitas politik, tetapi juga mendorong terciptanya komunikasi yang lebih demokratis, inklusif, dan edukatif. (Qadri, 2020)

Strategi komunikasi politik di era digital mengandalkan narasi kuat yang dibungkus dalam konten visual dan emosional untuk membentuk opini publik. Media sosial mempercepat penyebaran pesan, namun juga memicu polarisasi melalui ruang gema (echo chamber). Ketimpangan antara narasi dan realita dapat menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, komunikasi politik harus seimbang, etis, dan berbasis fakta. Pendekatan ini penting untuk membangun demokrasi yang sehat dan inklusif.

Di era digital, komunikasi politik mengalami pergeseran menjadi lebih cepat, terbuka, dan interaktif. Para politisi kini memanfaatkan media sosial untuk membangun citra dan memengaruhi persepsi publik secara masif. Narasi menjadi alat utama dalam menyampaikan pesan politik, namun sering kali tidak sejalan dengan realitas yang dihadapi masyarakat. Ketika komunikasi hanya fokus pada pencitraan, kepercayaan publik rentan menurun. Oleh sebab itu, strategi komunikasi politik harus mengedepankan kejujuran, relevansi, dan kesadaran konteks sosial.

KAJIAN TERDAHULU

Penelitian yang dilakukan oleh Zalzillah dan Gumelar (2024) dalam artikel berjudul “Kontribusi Media Digital dalam Membangun Opini Publik Pemilu 2024: Studi Kasus Narasi Newsroom” membahas bagaimana media digital digunakan sebagai sarana komunikasi politik untuk mempengaruhi persepsi publik. Mereka menemukan bahwa strategi narasi yang disusun oleh media online mampu membentuk opini masyarakat secara signifikan, khususnya menjelang momentum elektoral. Penelitian ini menekankan pentingnya konten naratif yang konsisten dan kredibel dalam menyampaikan pesan politik kepada publik digital.

Sementara itu, Kurniawan, Prayitno, dan Lestari (2021) melalui studi berjudul “Strategi Bahasa dalam Komunikasi Politik: Analisis Framing dan Tindak Tutur di Media Sosial” menyoroti bagaimana politisi menggunakan bahasa sebagai alat untuk membentuk realitas sosial. Dengan menganalisis berbagai unggahan politisi di media sosial, penelitian ini mengidentifikasi teknik framing, implikatur,

dan pilihan diksi sebagai strategi membangun dukungan dan citra politik. Studi ini menunjukkan bahwa kekuatan narasi dalam komunikasi politik sangat bergantung pada cara pesan dibungkus dan diarahkan pada emosi audiens.

Selanjutnya, penelitian oleh Dwi Frasetya (2025) dalam tulisannya “Transformasi Komunikasi Politik di Era Media Sosial: Dari Monolog ke Dialog Interaktif” menyoroti pergeseran model komunikasi politik dari top-down menjadi partisipatif. Frasetya menjelaskan bahwa realitas politik hari ini ditentukan oleh interaksi publik dalam menanggapi narasi yang disampaikan oleh politisi. Dalam konteks ini, strategi komunikasi tidak hanya berhenti pada penyampaian pesan, tetapi juga pada kemampuan untuk mendengarkan dan menyesuaikan dengan dinamika publik secara real-time

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan memahami secara mendalam strategi komunikasi politik dalam membentuk opini publik melalui narasi yang dibangun oleh aktor politik, serta sejauh mana narasi tersebut mencerminkan realitas sosial yang ada. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi makna, konteks, dan pesan komunikasi politik secara lebih komprehensif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi terhadap berbagai sumber seperti unggahan media sosial, berita online, konten kampanye, dan pidato politik. Selain itu, wawancara mendalam juga dilakukan kepada narasumber yang relevan, seperti praktisi komunikasi politik, tim kampanye, atau pengamat media, guna memperoleh sudut pandang langsung mengenai strategi yang diterapkan. Data dianalisis dengan menggunakan teknik analisis isi kualitatif, yaitu mengidentifikasi tema, simbol, gaya bahasa, dan pesan utama dalam materi komunikasi politik yang diteliti. Untuk menjaga validitas data, peneliti menggunakan triangulasi sumber, yakni dengan membandingkan data hasil dokumentasi, wawancara, dan observasi yang diperoleh dari berbagai platform. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu mengungkap bagaimana narasi politik dibentuk, disampaikan, dan diterima oleh publik dalam konteks komunikasi politik era digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Aktor politik menarik perhatian publik dengan narasi emosional seputar keadilan dan penderitaan, diperkuat oleh sentimen agama serta nasionalisme untuk membangun kedekatan. Strategi berbasis identitas ini memperkuat loyalitas pemilih. Kedekatan psikologis yang tercipta menjadi alat efektif dalam membentuk opini dan memengaruhi hasil pemilihan. (Khotimah & Karisma, 2024).

Dalam strategi komunikasi politik, narasi emosional dan berbasis identitas menjadi kunci dalam membentuk persepsi dan loyalitas publik. Aktor politik secara sadar membangun pesan yang menyentuh nilai-nilai seperti keadilan, nasionalisme, dan kebangsaan untuk memicu keterikatan psikologis dengan masyarakat. Narasi semacam ini sering dikemas melalui simbol-simbol visual, bahasa populis, serta kedekatan budaya yang relevan dengan latar belakang audiens. (Husain, 2025)

Narasi emosional dan berbasis identitas menjadi strategi yang sangat efektif dalam komunikasi politik karena mampu membangun kedekatan psikologis antara aktor politik dan masyarakat. Dengan mengangkat isu-isu seperti keadilan, penderitaan, nasionalisme, dan nilai-nilai keagamaan, aktor politik menciptakan resonansi emosional yang menyentuh sisi terdalam pemilih. Strategi ini memperkuat loyalitas dan kepercayaan, serta membentuk persepsi positif terhadap tokoh yang bersangkutan. Narasi semacam ini juga sering dikemas melalui simbol visual, bahasa populis, dan pendekatan yang sesuai dengan budaya lokal, sehingga mudah diterima oleh publik. Dampaknya, opini publik dapat diarahkan secara halus namun kuat, memengaruhi kecenderungan politik dan pilihan dalam pemilu.

Pemanfaatan platform digital menjadi kunci kampanye politik berkat jangkauan luas dan interaktivitasnya. Aktor politik menggunakan algoritma media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter untuk menargetkan pemilih berdasarkan minat. Konten visual dan narasi emosional membangun kedekatan dengan audiens. Namun, algoritma menciptakan echo chamber, mempersempit dialog, dan memperkuat bias. Ini meningkatkan partisipasi politik, tetapi berisiko polarisasi dan manipulasi persepsi publik (Sinamo et al., 2025)

Pemanfaatan platform digital menjadi kunci kampanye politik berkat jangkauan luas dan interaktivitasnya. Aktor politik menggunakan algoritma media sosial untuk menargetkan pemilih berdasarkan minat. Konten visual dan narasi emosional membangun kedekatan dengan audiens. Namun, algoritma menciptakan echo chamber, mempersempit dialog, dan memperkuat bias. Ini meningkatkan partisipasi politik, tetapi berisiko polarisasi dan manipulasi persepsi publik (Laventia & Faizal, 2025).

Pemanfaatan platform digital telah menjadi elemen krusial dalam kampanye politik, menawarkan jangkauan yang luas dan interaktivitas yang tinggi. Aktor politik secara strategis memanfaatkan algoritma media sosial, termasuk platform seperti Instagram, TikTok, dan Twitter, untuk menargetkan pemilih berdasarkan minat mereka. Konten yang kaya visual dan narasi emosional digunakan untuk membangun kedekatan yang kuat dengan audiens. Meskipun demikian, algoritma juga berkontribusi pada pembentukan echo chamber, yang pada gilirannya mempersempit ruang dialog dan memperkuat bias yang ada. Fenomena ini, meskipun dapat meningkatkan partisipasi politik, juga membawa risiko polarisasi dan manipulasi persepsi publik yang signifikan.

Strategi framing politik memanipulasi persepsi publik dengan menyoroti aspek isu tertentu dan mengaburkan lainnya. Pengaturan bahasa, simbol, dan waktu penyebaran pesan efektif mengarahkan opini publik. Pemanfaatan momentum politik memperkuat narasi positif dan mengalihkan perhatian dari isu merugikan. Framing menciptakan dominasi wacana, membentuk persepsi tunggal tentang kebenaran. Ini membatasi paparan publik terhadap beragam perspektif, menyembunyikan sisi lain isu. (Rahmawati, 2024)

Framing adalah alat strategis komunikasi politik untuk mengarahkan persepsi publik terhadap isu tertentu agar selaras dengan kepentingan politik. Aktor politik tidak hanya memilih aspek tertentu dari suatu isu untuk ditonjolkan, tetapi juga menentukan waktu dan cara penyajiannya agar mendominasi ruang wacana publik. (Mei et al., 2025)

Strategi framing merupakan alat komunikasi politik yang krusial untuk memanipulasi dan mengarahkan persepsi publik agar selaras dengan kepentingan aktor politik. Hal ini dilakukan melalui penyorotan selektif aspek isu tertentu sembari mengaburkan yang lain, serta pengaturan bahasa, simbol, dan waktu penyebaran pesan untuk mendominasi ruang wacana publik. Pemanfaatan momentum politik secara cerdas memungkinkan penguatan narasi positif sekaligus pengalihan perhatian dari isu-isu yang merugikan. Akibatnya, framing efektif menciptakan dominasi wacana yang membentuk persepsi tunggal tentang kebenaran, membatasi paparan publik terhadap beragam perspektif dan menyembunyikan sisi lain dari isu yang ada.

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa aktor politik secara strategis memanfaatkan narasi emosional dan berbasis identitas, serta framing isu, untuk membentuk dan memengaruhi opini publik. Penggunaan isu keadilan, penderitaan rakyat, agama, dan nasionalisme, dipadukan dengan pemanfaatan algoritma platform digital seperti media sosial, memungkinkan penyebaran pesan yang tersegmentasi dan pembentukan echo chamber. Meskipun strategi ini efektif dalam membangun kedekatan psikologis dan memperkuat loyalitas pemilih, hal tersebut juga berisiko membatasi paparan publik terhadap beragam perspektif, memperkuat polarisasi, dan memanipulasi persepsi, yang pada akhirnya memengaruhi hasil pemilihan.

Narasi politik yang efektif harus mencerminkan realitas sosial, seperti ketimpangan dan ketidakadilan, agar relevan dan kredibel di mata publik. Media sosial berperan sebagai jembatan langsung penyampaian narasi ini. Namun, seringkali narasi yang disampaikan hanya bersifat populis dan tidak merefleksikan kondisi riil. Hal ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara ekspektasi publik dan tindakan politik. (Faridhian Anshari, 2013).

Narasi politik yang menyentuh isu sosial faktual seperti ketimpangan ekonomi dan krisis kepercayaan, akan membangun keterhubungan kuat dengan publik. Hal ini meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pemilih. Sebaliknya, narasi tanpa tindakan nyata akan memicu kritik atau apatisme di ruang digital. Keterpaduan pesan dan realita sosial esensial untuk opini publik yang bertahan lama. (Heryanton & Rumar, 2013)

Pentingnya narasi politik yang merefleksikan realitas sosial agar kredibel dan relevan bagi publik. Salah satunya menekankan peran media sosial sebagai jembatan narasi, namun memperingatkan bahaya narasi populis yang tidak mencerminkan kondisi riil, berpotensi menciptakan kesenjangan ekspektasi. Senada, pandangan lain menegaskan bahwa narasi yang menyentuh isu faktual seperti

ketimpangan ekonomi dan krisis kepercayaan akan membangun keterhubungan kuat serta meningkatkan kepercayaan dan partisipasi pemilih. Keduanya sepakat bahwa ketidakonsistenan antara narasi dan tindakan nyata, terutama di ruang digital, dapat memicu kritik atau apatisme, menunjukkan bahwa keterpaduan pesan dan realita sosial adalah esensial untuk membentuk opini publik yang bertahan lama.

Dalam praktik kampanye politik, narasi sering kali dibentuk bukan berdasarkan realita sosial, melainkan semata-mata untuk membangun citra positif demi kepentingan elektoral. Kandidat cenderung menonjolkan isu yang populer dan menguntungkan, meskipun tidak sesuai dengan fakta yang dihadapi masyarakat (Fatimah, 2018).

Strategi ini bertujuan untuk menarik simpati dan suara pemilih melalui pesan yang dikemas secara persuasif, meski kadang menyesatkan. Ketika narasi tidak diiringi dengan bukti nyata, publik yang kritis akan merespons dengan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan. Hal ini memperlihatkan bahwa manipulasi naratif dalam politik memiliki risiko menciptakan disonansi antara ekspektasi publik dan tindakan politik yang sebenarnya.

Dalam praktik politik, pencitraan sering kali menjadi tujuan utama narasi yang dibentuk, bukan kejujuran terhadap realita sosial yang dihadapi masyarakat. Aktor politik menggunakan media, khususnya media sosial, untuk menampilkan pesan yang dikemas secara persuasif dan menarik, meskipun tidak selalu mencerminkan fakta. (Wahyuningsih et al., 2023). Ketidaksesuaian antara narasi dan kenyataan ini menciptakan jurang ekspektasi, sehingga menimbulkan disonansi publik terhadap figur politik. Ketika publik menyadari manipulasi yang terjadi, kepercayaan terhadap tokoh dan institusi politik dapat menurun drastis. Hal ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi yang hanya berorientasi pada citra tanpa landasan realitas sosial justru berisiko menciptakan apatisme pemilih.

Narasi politik efektif harus mencerminkan realitas sosial, seperti ketimpangan dan ketidakadilan, agar relevan dan kredibel. Media sosial berperan penting dalam penyampaian langsung. Namun, seringkali narasi hanya populis dan tidak faktual, menciptakan kesenjangan antara ekspektasi publik dan tindakan politik. Hal ini berisiko menimbulkan kekecewaan dan hilangnya kepercayaan publik.

Secara keseluruhan narasi politik yang efektif harus mencerminkan realitas sosial, seperti ketimpangan dan ketidakadilan, agar relevan dan kredibel di mata publik. Meskipun media sosial berperan penting sebagai jembatan langsung penyampaian narasi, seringkali narasi yang disampaikan hanya bersifat populis dan tidak faktual, bahkan dibentuk semata-mata untuk pencitraan dan kepentingan elektoral. Ketidaksesuaian antara narasi dan kenyataan ini berpotensi menciptakan kesenjangan antara ekspektasi publik dan tindakan politik, memicu kekecewaan, hilangnya kepercayaan, disonansi publik, dan bahkan apatisme pemilih, terutama ketika publik menyadari adanya manipulasi naratif.

Disonansi kognitif terjadi ketika persepsi masyarakat tentang narasi politik tidak sesuai dengan kenyataan di lapangan. Ketidaksesuaian ini menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian di kalangan publik, karena informasi yang diterima tidak konsisten. Akibatnya, muncul rasa kecewa terhadap kinerja aktor politik dan pemerintah, yang tidak mampu memenuhi harapan atau memenuhi janji mereka. Hal ini menyebabkan penurunan kepercayaan masyarakat terhadap institusi pemerintahan dan proses politik secara umum. Dampak jangka panjangnya, legitimasi pemerintah menjadi tergerus, dan sikap skeptis terhadap pemerintahan semakin meningkat. (Hukum & Hukum, 2025)

Ketidakcocokan antara narasi politik yang disampaikan pemerintah dan kenyataan di lapangan menimbulkan disonansi kognitif di kalangan masyarakat. Ketika harapan mereka tidak terpenuhi atau berbeda dengan fakta yang ada, muncul rasa kebingungan dan frustrasi. Hal ini memperburuk citra pemerintah di mata publik dan menurunkan tingkat kepercayaan terhadap institusi pemerintahan. Disonansi ini menyebabkan masyarakat merasa diberi janji palsu dan tidak yakin terhadap komitmen pemerintah. Akibatnya, legitimasi aktor politik semakin melemah dan kepercayaan publik terus menurun. (Image, 2024)

Disonansi kognitif muncul ketika narasi politik yang disampaikan tidak selaras dengan kenyataan yang dialami masyarakat, menciptakan kebingungan dan kekecewaan. Ketidaksesuaian ini mengikis kepercayaan publik terhadap aktor politik dan institusi pemerintahan, yang pada gilirannya dapat mengikis legitimasi pemerintah dan meningkatkan skeptisisme masyarakat. Hal ini diperparah

ketika janji-janji politik tidak terpenuhi, yang memperburuk citra pemerintah dan semakin menurunkan kepercayaan terhadap komitmen yang diberikan.

Polarisasi dan fragmentasi opini publik terjadi ketika narasi politik yang tidak akurat menciptakan perbedaan persepsi di masyarakat. Ketidakcocokan ini mendorong pembentukan kelompok-kelompok ideologis yang saling berseberangan. Akibatnya, masyarakat terpecah menjadi dua kubu yang sulit untuk berkomunikasi dan mencapai kesepakatan. Polarisasi sosial ini dapat menghambat proses demokrasi dan menciptakan ketegangan di antara kelompok-kelompok tersebut. Oleh karena itu, penting untuk mempromosikan dialog yang konstruktif dan informasi yang akurat untuk mengurangi polarisasi. (Annas et al., 2019)

Narasi politik yang tidak akurat dapat menyebabkan perpecahan dalam masyarakat, menciptakan kelompok-kelompok dengan pandangan ideologis yang bertentangan. Polarisasi sosial ini memperdalam perbedaan pendapat dan menghambat dialog konstruktif antara kelompok. Ketika masyarakat terjebak dalam pandangan yang ekstrem, konsensus publik menjadi sulit dicapai. Selain itu, informasi yang bias memperkuat loyalitas kelompok, membuat individu lebih cenderung menolak perspektif yang berbeda. Akibatnya, fragmentasi opini publik semakin meningkat, mengganggu stabilitas sosial dan politik. (Marta, 2024).

Polarisasi dan fragmentasi opini publik merupakan dampak nyata dari narasi politik yang tidak akurat, di mana perbedaan persepsi yang diciptakan mendorong terbentuknya kelompok-kelompok ideologis yang saling berseberangan. Ketidakcocokan antara narasi dan realitas memperdalam jurang perbedaan pandangan, sehingga menghambat dialog konstruktif dan melemahkan kemampuan masyarakat untuk mencapai konsensus. Ketika informasi yang bias dan manipulatif terus disebarluaskan, loyalitas kelompok pun semakin menguat, membuat individu menolak pandangan yang berbeda dan mendorong sikap ekstrem. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kohesi sosial, tetapi juga menciptakan ketegangan yang berpotensi melemahkan stabilitas demokrasi dan politik nasional

Krisis representasi dalam politik terjadi ketika masyarakat merasa bahwa narasi yang disampaikan oleh para pemimpin politik tidak mencerminkan kebutuhan dan aspirasi mereka. Ketidakpuasan ini menyebabkan mereka merasa terasing dan tidak terwakili dalam sistem yang ada. Akibatnya, partisipasi politik menurun, dan sikap apatis terhadap proses demokrasi semakin meningkat. Masyarakat cenderung menjadi penonton pasif, membiarkan dinamika politik berlangsung tanpa keterlibatan mereka. Hal ini berpotensi mengancam keberlangsungan demokrasi dan legitimasi institusi politik. (Pribadi, 2009)

Dalam konteks komunikasi politik Islam di Indonesia terkait isu Palestina, krisis representasi muncul ketika solidaritas hanya menjadi simbol politik tanpa implementasi kebijakan konkret, mereduksi Islam sebagai alat legitimasi kekuasaan semata. Kondisi ini mengikis kepercayaan publik terhadap negara, terutama jika terdapat kontradiksi antara komitmen moral yang diklaim dan tindakan pragmatis yang dijalankan. Apatisme politik dapat muncul karena ruang aspirasi keumatan tidak memperoleh representasi yang tulus dan konsisten di level negara. Krisis representasi ini membuka celah bagi kelompok ekstrem atau populis untuk mengklaim representasi keislaman otentik, mengancam koherensi sosial dan stabilitas politik. Oleh karena itu, tekanan dari publik dan ormas Islam menjadi kontrol moral penting dalam demokrasi, mewadahi kontestasi antara aspirasi rakyat dan strategi negara. (Harahap et al., 2025)

Krisis representasi dalam politik, khususnya dalam komunikasi politik Islam di Indonesia terkait isu Palestina, mencerminkan ketimpangan antara narasi simbolik yang digaungkan oleh elite politik dan tindakan konkret yang ditunggu masyarakat. Ketika solidaritas terhadap Palestina hanya dijadikan komoditas politik tanpa diikuti langkah kebijakan nyata, Islam tereduksi menjadi alat legitimasi kekuasaan semata. Hal ini menimbulkan rasa keterasingan di kalangan umat, memicu apatisisme politik, dan membuka ruang bagi kelompok populis atau ekstrem yang mengklaim representasi Islam yang lebih "otentik". Ketidakkonsistenan negara dalam menyuarakan aspirasi keumatan menciptakan krisis kepercayaan yang membahayakan kohesi sosial dan stabilitas politik. Dalam konteks ini, tekanan moral dari publik dan ormas Islam menjadi penting untuk menjaga akuntabilitas serta memastikan bahwa aspirasi umat tidak hanya dipakai sebagai simbol, tetapi benar-benar terwakili dalam kebijakan negara.

Secara Keseluruhan politik yang tidak akurat dan berorientasi pada pencitraan tanpa dasar realitas sosial menimbulkan disonansi kognitif, krisis representasi, serta polarisasi dalam masyarakat. Ketika aktor politik menggunakan media, terutama media sosial, untuk menyampaikan pesan yang manipulatif dan populistis, publik lambat laun menyadari ketidaksesuaian antara janji dan tindakan, sehingga kepercayaan terhadap institusi politik pun menurun. Dalam konteks komunikasi politik Islam di Indonesia, khususnya terkait isu Palestina, simbolisasi solidaritas yang tidak dibarengi kebijakan nyata menciptakan kekecewaan dan keterasingan di kalangan umat, membuka celah bagi kelompok populistis yang mengklaim otentisitas representasi keislaman. Akibatnya, masyarakat tidak hanya menjadi apatis, tetapi juga terfragmentasi dalam pandangan ideologis yang memperparah ketegangan sosial dan politik. Oleh karena itu, narasi politik yang efektif harus mencerminkan realitas, bersifat jujur, serta menjawab aspirasi publik secara konsisten agar dapat memperkuat legitimasi politik dan menjaga stabilitas demokrasi.

SIMPULAN

Pemanfaatan narasi emosional dan berbasis identitas menjadi strategi krusial bagi aktor politik dalam membentuk persepsi dan loyalitas publik. Dengan secara sadar membangun pesan yang menyentuh nilai-nilai seperti keadilan, nasionalisme, dan kebangsaan, aktor politik dapat memicu keterikatan psikologis dengan masyarakat. Narasi ini sering dikemas melalui simbol visual, bahasa populistis, serta kedekatan budaya yang relevan dengan audiens, sehingga mudah diterima publik dan secara halus namun kuat mengarahkan opini. Strategi ini terbukti efektif dalam memperkuat loyalitas pemilih dan membentuk persepsi positif terhadap tokoh yang bersangkutan.

Platform digital memegang peranan kunci dalam kampanye politik karena jangkauan luas dan interaktivitasnya. Aktor politik memanfaatkan algoritma media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Twitter untuk menargetkan pemilih berdasarkan minat mereka. Konten visual dan narasi emosional digunakan untuk membangun kedekatan yang kuat dengan audiens. Namun, algoritma ini juga dapat menciptakan echo chamber, mempersempit dialog, dan memperkuat bias yang ada. Meskipun dapat meningkatkan partisipasi politik, fenomena ini berisiko polarisasi dan manipulasi persepsi publik yang signifikan.

Strategi framing politik merupakan alat penting untuk memanipulasi dan mengarahkan persepsi publik agar selaras dengan kepentingan aktor politik. Hal ini dilakukan dengan menyoroti secara selektif aspek isu tertentu sembari mengaburkan yang lain, serta mengatur bahasa, simbol, dan waktu penyebaran pesan untuk mendominasi ruang wacana publik. Pemanfaatan momentum politik memungkinkan penguatan narasi positif dan pengalihan perhatian dari isu yang merugikan. Akibatnya, framing yang efektif dapat menciptakan dominasi wacana yang membentuk persepsi tunggal tentang kebenaran, membatasi paparan publik terhadap beragam perspektif, dan menyembunyikan sisi lain dari isu yang ada.

Namun, permasalahan krusial muncul ketika narasi politik yang disampaikan tidak sejalan dengan realitas yang dihadapi publik. Ketidaksesuaian ini menimbulkan disonansi kognitif, kebingungan, dan ketidakpastian di kalangan publik karena informasi yang diterima tidak konsisten. Akibatnya, muncul rasa kecewa terhadap kinerja aktor politik dan pemerintah, serta penurunan kepercayaan terhadap institusi pemerintahan dan proses politik secara umum. Dampak jangka panjangnya adalah legitimasi pemerintah yang tergerus, peningkatan skeptisisme, dan perasaan diberi janji palsu, yang pada akhirnya memperburuk citra dan komitmen pemerintah di mata publik.

Disonansi kognitif yang dihasilkan oleh ketidaksesuaian narasi politik dengan realitas lapangan memiliki dampak serius pada legitimasi pemerintah dan stabilitas sosial. Ketika masyarakat merasa kebingungan dan kecewa akibat informasi yang tidak konsisten, kepercayaan terhadap institusi pemerintahan dan proses politik menurun drastis. Hal ini diperparah saat harapan publik tidak terpenuhi atau janji politik tidak terwujud, memunculkan perasaan diberi janji palsu dan keraguan akan komitmen pemerintah. Akibatnya, legitimasi aktor politik melemah, skeptisisme meningkat, dan citra pemerintah memburuk di mata publik. Kondisi ini tidak hanya mengganggu kohesi sosial tetapi juga berpotensi melemahkan stabilitas demokrasi dan politik nasional.

Secara keseluruhan, komunikasi politik di era digital, meskipun efektif dalam membangun kedekatan dan loyalitas melalui narasi emosional dan framing isu, memiliki risiko serius jika tidak mencerminkan realitas sosial. Ketika narasi yang disampaikan hanya bersifat populistis dan dibentuk untuk pencitraan semata, tanpa landasan kejujuran dan relevansi, akan terjadi kesenjangan antara ekspektasi publik dan tindakan politik. Hal ini dapat memicu kekecewaan, hilangnya kepercayaan, disonansi publik, bahkan apatisme pemilih, serta memperkuat polarisasi dan fragmentasi opini. Oleh karena itu, narasi politik yang efektif harus mencerminkan realitas, bersifat jujur, dan menjawab aspirasi publik secara konsisten guna memperkuat legitimasi politik dan menjaga stabilitas demokrasi

REFERENSI

- Annas, F. B., Petranto, H. N., & Pramayoga, A. A. (2019). Opini publik dalam polarisasi politik di media sosial public opinion of political polarization on social media. *Jurnal PIKOM (Penelitian Komunikasi Dan Pembangunan)*, 20(2), 111.
- Diaz Ruiz, C., & Nilsson, T. (2023). Disinformation and Echo Chambers: How Disinformation Circulates on Social Media Through Identity-Driven Controversies. *Journal of Public Policy and Marketing*, 42(1), 18–35. <https://doi.org/10.1177/07439156221103852>
- Dwi Frasetya, R. (2025). Dinamika Komunikasi Politik Di Era Digital: Pengaruh Media Sosial Terhadap Partisipasi Politik Masyarakat. 12(1), 227–236.
- Faridhian Anshari. (2013). Komunikasi Politik di Era Media Sosial Faridhian Anshari Staff Pengajar STT PLN Jakarta. *Jurnal Komunikasi*, 8(1), 91–101. <http://dosen.univpancasila.ac.id/dosenfile/7014211002154994371612February2019.pdf>
- Fatimah, S. (2018). Kampanye sebagai Komunikasi Politik: Esensi dan Strategi dalam Pemilu. *Resolusi: Jurnal Sosial Politik*, 1(1), 5–16.
- Harahap, J. Z., Islam, U., & Sumatera, N. (2025). Antara Moralitas dan Realitas Politik : Sikap Komunikasi Islam Indonesia terhadap Krisis Palestina. 5(1), 36–44.
- Heryanton, G. gun, & Rumar, S. (2013). Dokumen 135.pdf.
- Hukum, F., & Hukum, S. (2025). “No Viral No Justice” : Ketidaksesuaian Fakta Hukum Dengan Fakta. 5(2), 1160–1171.
- Husain, M. N. (2025). Analisis Perubahan Strategi Komunikasi Politik Prabowo Subianto dalam Pemilu 2019 dan 2024. 3(April), 20–28.
- Image, R. (2024). Mereproduksi Citra , Mencari Legitimasi : Analisis Peran Biro Humas dalam Dinamika Sosial-Politik Pemerintah Daerah. 19(1), 63–78.
- Khotimah, K., & Karisma, D. A. (2024). Konstruksi Narasi Politik dalam Tayangan Youtube bertajuk ‘ 3 Bakal Calon Presiden Bicara Gagasan ’ di Narasi Mata Najwa. *Scientia: Social Sciences&Humanities Issn*, 3(2), 364–375. <https://doi.org/10.51773/sssh.v3i2.329>
- Kurniawan, Y. S., Priyanga, K. T. A., Krisbiantoro, P. A., & Imawan, A. C. (2021). Open access Open access. *Journal of Multidiciplinary Applied Natural Science*, 1(1), 1–12.
- Laventia, F., & Faizal, A. (2025). Pendidikan Politik di Era Digital : Media Sosial sebagai Katalis atau Distorsi ? 4(1), 423–427.
- Marta, R. (2024). Polarisasi Dan Pembentukan Opini Publik Di Media Sosial Selama Universitas Andalas – Indonesia Universitas Andalas – Indonesia. 5(2), 205–214.
- Mei, R., Mei, R., & Mei, A. (2025). isi kualitatif dan model framing Entman, penelitian ini. 8(3).
- Pribadi, A. (2009). Seni Memimpin Republik. *Psikindonesia.Org*, 2004, 1–15. https://psikindonesia.org/assets/2016/11/7_SOD_Jakarta_Seni-Memimpin-Republik-1.pdf
- Qadri, M. (2020). Pengaruh Media Sosial Dalam Membangun Opini Publik. *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 1(1), 49–63. <https://doi.org/10.24239/qaumiyyah.v1i1.4>
- Rahmawati, A. (2024). Analisis Framing Berita Kebijakan Publik Tentang Penetapan Status Polusi Udara Di Jakarta Sebagai Bencana Di Media Online Detik . Com Skripsi Hidayatullah Jakarta 1446 H / 2024 M.
- Sinamo, D. R., Gultom, G. M., & Sinurat, R. (2025). Media dan Perubahan Sosial Studi Kasus : Tentang Penggunaan Media Sosial Dalam Kampanye Politik dan Dampaknya Terhadap Partisipasi Politik. 01(03), 223–230.
- Sosial, J. I. (2024). echo chamber ,. 5(5).

- Wahyuningsih, E., Unde, A., & Akbar, M. (2023). Social Media as a Strategy Political Communication. <https://doi.org/10.4108/eai.22-7-2023.2335116>
- Zalzillah, L. N., & Gumelar, R. G. (2024). Kontribusi Media Digital dalam Membangun Opini Publik Pemilu 2024 (Studi Kasus Narasi Newsroom). JPW (Jurnal Politik Walisongo), 6(1), 48–59. <https://doi.org/10.21580/jpw.v6i1.19527>